



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENUNGGU KUOTA HAJI TAHUN 1443 H/2022

Rohani Budi Prihantin

Peneliti Madya

rohani.prihantin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pelonggaran kebijakan Covid-19 oleh Pemerintah Arab Saudi memberi secercah harapan bahwa tahun ini pelaksanaan haji diharapkan sudah kembali mendekati normal. Minimal, untuk musim 2022 ini, Pemerintah Arab Saudi mengizinkan jamaah dari berbagai negara menunaikan ibadah haji, meski kuotanya tidak sebanyak ketika sebelum wabah Covid-19 melanda dunia.

Seperti diketahui dalam dua tahun terakhir ini, ibadah haji hanya diizinkan bagi warga yang bermukim di Saudi. Baik itu penduduk asli setempat maupun warga negara asing yang sudah tinggal di negara tersebut. Jumlah kuota hajinya pun sangat terbatas. Pada musim haji 2020 hanya 1.000 jamaah, sedangkan pada musim haji 2021 sebanyak 60 ribu orang. Harus diakui, kebijakan yang diterapkan Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut berimbas pada calon jamaah haji dari Indonesia. Sudah dua tahun ini, calon jamaah haji Tanah Air tidak bisa mewujudkan keinginannya menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Kini setelah Pemerintah Arab Saudi mencabut sebagian besar aturan yang diberlakukan untuk pencegahan penularan Covid-19, termasuk aturan mengenai kewajiban menjalani tes RT-PCR, menjaga jarak, dan memakai masker di tempat terbuka serta aturan karantina bagi pelaku perjalanan, membuka peluang jamaah Indonesia untuk berhaji. Sinyal bahwa Arab Saudi kini membuka pintu luas-luas untuk pendatang dari luar, harus dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk berdiplomasi dan bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

Meski kita sepenuhnya menyadari bahwa Arab Saudi adalah negara yang sulit diajak bernegosiasi dalam urusan pelaksanaan haji dan umrah, hal itu bukan menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia menunggu dengan pasif. Kita harus aktif menjalin komunikasi dengan mereka. Walaupun hasilnya belum memuaskan, Pemerintah Indonesia harus terus mengejar kepastian haji tahun ini. Ada dua hal yang sangat dinanti oleh calon jamaah haji Indonesia. Pertama, apakah pada tahun 2022 ini, Arab Saudi sudah membuka diri untuk calon jamaah haji dari berbagai negara. Jika hal itu terjadi maka kemudian dinanti jamaah haji kita adalah berapa kuota yang akan diberikan kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia tertinggal dengan negara lain yang sudah mendapatkan kepastian dari Arab Saudi terkait pengiriman jamaah. Informasi yang beredar kemarin, Pakistan menjadi salah satu negara yang sudah mendapatkan kepastian dari Arab Saudi.

Seperti dikutip dari laman Geo, Kamis (10/3), seorang pejabat Kementerian Agama dan Kerukunan Antaragama Pakistan menyebutkan bahwa Kebijakan Haji Pakistan 2022 akan diumumkan setelah pemerintahnya menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh ketinggalan dari negara lain. Termasuk berkaitan dengan kuota calon jamaah haji asal Indonesia. Karena itu, kalau perlu, tidak hanya level menteri agama yang memperjuangkan keberangkatan haji asal Indonesia. Presiden Joko Widodo pun dapat menghubungi Raja Salman, untuk memberi pandangan soal pentingnya pelaksanaan haji dibuka dari berbagai negara, juga memperjuangkan jumlah kuota untuk Indonesia.

Kini, dibuka atau tidaknya pintu bagi calon jamaah haji internasional termasuk dari Indonesia sangat bergantung situasi pandemi COVID-19. Apabila situasi mendukung, dalam hal ini angka COVID-19 terus menurun, Pemerintah Arab Saudi kemungkinan akan mengundang kembali jamaah haji internasional. Kuota setiap negara akan sangat dibatasi berdasarkan persentase, bukan jumlah. Sejauh ini, Kementerian Agama baru sebatas melakukan mitigasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dengan tiga opsi. Ketiga opsi tersebut adalah kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jamaah haji.

Atensi DPR

Harus diakui, kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 H/2022 M mendatang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Sampai saat ini pun Kementerian Agama belum mendapat undangan dari Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M. Komisi 8 DPR RI harus mendorong Pemerintah untuk aktif dalam melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan kepastian dibukanya penyelenggaraan haji tahun 1443 H/2022 M dan tentu saja memohon kiranya Arab Saudi memberikan kuota yang besar buat Indonesia karena jumlah antrian yang sudah begitu panjang. Di samping itu agar tidak terjadi kekisruhan antrian maka Pemerintah diminta untuk bersikap tegas bahwa calon jamaah haji yang berhak berangkat nantinya adalah jamaah pada tahun 1441 H/2020 M yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

Sumber

Antaranews.com, 11 Maret 2022;

Okezone.com, 16 Maret 2022;

Republika, 11 Maret 2022;

Tribunnews, 17 Maret 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras S.
Dewi Wuryandani
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022